

SUBAK DALAM PUSARAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

Gede Wirata

Email : wirata_gede@yahoo.com

Ida Ayu Sri Widnyani

[Email : dayusriwid@gmail.com](mailto:dayusriwid@gmail.com)

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ngurah Rai**

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi alih fungsi lahan terhadap keberadaan *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan. Perkembangan dunia pariwisata telah membawa perubahan yang luar biasa bagi kehidupan orang Bali. Perkembangan pariwisata membutuhkan sarana dan prasarana pendukung seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Hal itu kemudian berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian yang merupakan ranah *subak*. Situasi ini secara tidak langsung telah menjadi salah satu ancaman bagi keberadaan *subak*. Ancaman itu bisa dilihat dari implikasi alih fungsi lahan terhadap keberadaan *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan. Implikasi yang ditimbulkan bisa dilihat dari tiga aspek yaitu aspek infrastruktur yang bisa dilihat secara nyata telah terjadi pengurangan jumlah sawah yang merupakan aset *subak*. Kedua perubahan struktur sosial yaitu berkurangnya jumlah *krama subak*. Ketiga, suprastruktur melemahnya ikatan dengan Pura *subak* dari *pengempon* Pura Ulundanu menjadi tidak sehingga saat ini diserahkan ke *desa pakraman*. Temuan menarik yang ada dalam kajian ini adalah masih dipertahankannya Pura Ulundanu sebagai representasi Dewi Sri yang merupakan dewi kesuburan, ini membuktikan bahwa masyarakat di sana masih memiliki *trust* yang kuat sehingga mereka menjadikan hal tersebut sebagai suatu yang wajar untuk tetap dilaksanakan walaupun mereka tidak memiliki tanah dan menjadi anggota *subak*.

Kata kunci: *alih fungsi lahan, implikasi, subak*

PENDAHULUAN

Bali sangat populer di dunia pariwisata sehingga banyak wisatawan memberikan berbagai julukan seperti “*Bali the Last Paradise*” (Powell, 1930) dan “*The Morning of The World*” (Vicker, 1996 : 5). Pariwisata Bali tidak bisa dilepaskan dari kehidupan agraris yang menjadi ciri khas daerah ini. Salah satu bukti nyata pentingnya pertanian bagi kehidupan masyarakat Bali adalah keberadaan sistem irigasi *subak*. *Subak* adalah sistem tata kelola perairan yang khas milik masyarakat Bali. Menurut Sirtha (2008: 8) fungsi utama *subak* adalah mengatur pengairan untuk pertanian dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat

subak antara lain menata jaringan irigasi, mengatur pembagian air, mengatur penggiliran pola tanam, dan melaksanakan kegiatan upacara. Pelaksanaan organisasi *subak* berdasarkan hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Hindu Bali.

Berbicara tentang *subak* di Bali secara umum ada dua jenis *subak* yaitu *subak* dan *subakabiyen*. *Subak* secara umum mengatur tata kelola sawah yang ada airnya. Sedangkan *subakabiyen* adalah *subak* untuk mengelola masyarakat yang berkecimpung pada pertanian lahan kering seperti tegalan, perkebunan dan sawah tadah hujan. Selain itu, Keberadaan *subak* begitu penting dalam sistem pertanian masyarakat Bali, karena sejatinya *subak* yang ada di Bali bukan sekedar sistem tata kelola air namun juga memiliki dimensi sosial, budaya dan religius yang begitu kuat. Oleh karenanya *subak* cukup vital dalam membentengi kehidupan sosial budaya dan religius masyarakat Bali.

Namun seiring dengan perkembangan pariwisata yang semakin masif secara tidak langsung telah berimplikasi pada perubahan tata ruang tanah Bali, salah satunya di sebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akomodasi pariwisata seperti hotel, restoran, jalan dan sebagainya. Alih fungsi lahan pertanian berpengaruh juga pada keberadaan *subak* sebagai satu kesatuan sistem pertanian tradisional di Bali, seperti yang disampaikan oleh Sutawan (2008: 18) Pembangunan sarana prasarana perkantoran dan pariwisata yang terjadi terus menerus, mempunyai konsekuensi logis adanya alih fungsi lahan sehingga secara tidak langsung mempersempit lahan pertanian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nasoetion (2003: 71) menjelaskan sebab-sebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan akibat yang ditimbulkan seperti pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah dan faktor alami sebagai penyebab alih fungsi lahan.

Demikian masifnya alih fungsi lahan yang terjadi secara terus menerus telah menggerus keberadaan *subak*, sehingga ada ketakutan jika *subak* akan hilang dari kebudayaan masyarakat Bali. Fenomena itu semakin mudah terjadi karena masyarakat Bali sendiri saat ini tersandra oleh adanya berbagai ideologi global. Tanpa disadari secara perlahan masyarakat telah melupakan dan meninggalkan sistem pertanian sebagai satu kesatuan utuh dari *subak* itu. Orang Bali saat ini telah terdoktrin oleh ideologi luar secara tidak disadari yang oleh Gramsci (1971) disebut dengan hegemoni. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Barker, 2009: 62). Lebih lanjut Gramsci (1971) menggunakan istilah hegemoni untuk mengacu pada cara kelompok dominan dalam masyarakat mendapat dukungan dari kelompok-kelompok subordinasi melalui proses

kepemimpinan intelektual dan moral. Proses hegemoni bisa dilihat dari pembentukan makna (*meaning*) dan nilai-nilai (*value*) dominan yang dihasilkan lewat berbagai media (Piliang, 2009 : 136). Kuatnya hegemoni tersebut menyebabkan orang Bali saat ini memiliki pandangan bahwa pekerjaan di bidang pertanian sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan sehingga tidak pantas untuk digeluti, pekerjaan orangtua, kotor dan berpenghasilan rendah. Orang Bali lebih memilih menjadi pegawai hotel, pelayan restoran, bekerja di kapal pesiar atau pekerjaan lain nonpertanian yang menurut mereka memiliki prestise lebih tinggi. Ini bisa dilihat dari semakin berkurangnya lahan pertanian dan juga semakin jaranginya pemuda yang mau menggeluti pekerjaan petani tersebut.

Situasi yang demikian oleh Bourdieu (1983) dipandang sebagai penciptaan habitus baru, habitus pertanian sebagai pekerjaan yang termarginalkan sehingga wajar untuk ditinggalkan. Kecenderungan itu semakin kuat karena pada keseharian orang Bali saat ini ada dalam kehidupan budaya global. Kebudayaan global yang kuat itu bisa dilihat dari gaya hidup hedonisme-konsumerisme yang mendewakan kepemilikan lambang-lambang modern seperti handphone, rumah mewah, dan mobil. Masyarakat Bali saat ini jauh lebih bangga memiliki berbagai ikon budaya global itu dibandingkan dengan kepemilikan tanah seperti yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali beberapa dekade yang lalu. Fenomena itu bisa dilihat lebih lanjut pada adanya ungkapan di masyarakat "*jani ngelah tanah nak sing dadi anggo gena*"(sekarang punya tanah tidak bisa dipakai apa). Ungkapan itu menjadi bukti bahwa orang Bali saat ini sudah mulai menganggap kepemilikan tanah bukan suatu yang mutlak, karena mereka tidak lagi bekerja sebagai petani. Sehingga wajar jika ada lahan pertaniannya termasuk *subak* sudah mulai tidak memiliki pendukung.

Namun demikian ada hal yang menarik terkait dengan keberadaan *subak* dalam dimensi religius seperti yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan, simbol Pura *subak* masih dipertahankan sedangkan lahan *subak* dan warga *subaknya* sudah tidak ada. Fenomena itu menunjukkan bahwa orang Bali telah tersandra oleh budaya global sehingga membuatnya berada dipersimpangan antara mempertahankan budaya lokal salah satunya *subak* atau hanyut dalam budaya global yang terus berkembang. Oleh karenanya menarik untuk dikaji lebih lanjut implikasi alih fungsi lahan terhadap *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan paradigma keilmuan kajian budaya (*cultural studies*). Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Alat yang dipakai berupa pedoman observasi dan wawancara. Proses observasi

dilakukan pada objek penelitian yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan, yang dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada petani, *kelihansubak*, pemerintah daerah, investor dan pelaku pariwisata di Kecamatan Denpasar Selatan. Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman(1992) dan teori-teori kritis, sehingga menghasilkan deskripsi kritis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirancang.

PEMBAHASAN

Subak dalam Pusaran Alih Fungsi Lahan

Subak sebagai pranata sosial merupakan salah satu wujud budaya baik ditinjau dari ide ataupun gagasannya yang dituangkan dalam *awig-awigsubak*, baik dilihat dari aktivitas ataupun kegiatannya mulai dari mengolah tanah pertanian, sampai padi di panen serta serentetan upacara dalam konteks kegiatan ritual, maupun dilihat dari wujud fisiknya yang berupa petak-petak sawah, bendungan, terasering, saluran irigasi ataupun tempat-tempat suci, menyebabkan peran *subak* mampu menjaga keseimbangan lingkungannya (Pitana, 2003: 61).

Banyak kalangan yang menganggap bahwa pertanian bisa menjadi pilar pendukung bagi perekonomian Bali. Kendati demikian, pertanian Bali juga dihadapkan dengan banyak kendala. Salah satunya adalah mengenai penyesuaian dan penggunaan lahan. Perkembangan arus pariwisata di Bali yang sangat besar membuat lahan pertanian menjadi tertekan. Kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata yang memanfaatkan lahan pertanian, membuat para investor dalam maupun luar negeri banyak memburu lahan-lahan yang produktif di bidang pertanian berubah menjadi lahan bidang pariwisata. Kontribusi yang besar kepada para pemilik lahan menjadi salah satu cara untuk meluluhkan para pemilik lahan agar lahannya dapat digunakan menjadi sektor pariwisata (Suputra, dkk, 2012: 62).

Nilai-nilai yang terkandung di dalam *subak* bukan hanya berfungsi untuk mengatur irigasi saja, namun mampu pula menarik perhatian para ahli dari Barat, untuk digunakan sebagai bahan penelitian (Pitana, 2003). *Subak* sebagai salah satu dari wujud budaya yang merupakan aset daerah, dengan keindahan petak-petak sawahnya yang berterasering serta kegiatan para petaninya mulai dari membajak tanah sawahnya sampai menuai hasil panennya, maupun aktivitas ritualnya yang penuh keunikan, mampu menarik para wisatawan manca negara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnu). Semua menyebabkan Bali terangkat menjadi daerah pariwisata yang bernafaskan budaya. Hal ini disebabkan antara lain oleh

peran *subak* dalam ikut melestarikan lingkungannya, dan dengan itu juga membuat sistem *subak* tetap ada atau terjaga sampai kini.

Seiring perjalanan waktu perkembangan pariwisata disaat yang bersamaan juga menyebabkan orang Bali terlena dengan kehidupan modern. Tanpa disadari orang Bali terhegemoni dan terperangkap dalam gaya hidup hedonis yang mengagungkan materi. Gramsci (1971) menggunakan istilah hegemoni untuk mengacu pada cara kelompok dominan dalam masyarakat mendapat dukungan dari kelompok-kelompok subordinasi melalui proses kepemimpinan intelektual dan moral. Gramsci menyoroti persoalan baru yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh pemikir Marxisme. Integritas intelektual kaum filsuf adalah persoalan yang muncul secara orisinal dalam pengalaman politik di Italia di bawah rezim fasis Mussolini. Dalam hubungan ini Simon (2004 : xv-xvi) menulis sebagai berikut.

”Dalam realitas sosial yang dianalisis Gramsci menunjukkan bahwa formasi sosial kapitalistik yang eksploitatif dan penindasan politik rezim fasisme Mussolini ternyata tidak secara otomatis melahirkan revolusi sosial, malah muncul gejala menguatnya “*deproletarisasi*”, di mana para buruh rela dan “*concern*” menerima penderitaan, bahkan mendukung keberadaan rezim Mussolini. Pengalaman penyerahan ideologi dan budaya kaum tertindas terhadap golongan yang menindas ini menarik perhatian Gramsci, dan reaksi intelektual atas kejadian itu, Gramsci mencetuskan teorinya tentang hegemoni. Teori ini pada dasarnya menjadi antitesa terhadap model perubahan sosial yang sangat positivistik dalam teori Marxisme saat itu”.

Kuatnya hegemoni ideologi modern itu menyebabkan orang Bali tidak lagi memiliki sifat kritis, sehingga menyebabkan alih fungsi lahan berlangsung dengan cepat dan masif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian khususnya yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan telah mengancam kelestarian keberadaan *subak*. Dilihat dari pendapatnya Sanderson (2003) maka dampak itu bisa dilihat dari tiga aspek yaitu infrastruktur, struktur sosial dan suprastruktur.

Sedangkan jika dilihat dari aspek ideologi masyarakat Bali bisa dilihat dari *konsep Tri Hita Karana* (Wiana, 2007). Dalam ideologi *Tri Hita Karana*, Perubahan akibat adanya alih fungsi lahan tersebut terhadap keberadaan sistem *subak* pada umumnya berawal dari *aspek palemahan* yaitu sawah atau ladang beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, perguruan tinggi, perhotelan, pusat pembelanjaan dan fungsi-fungsi bisnis lainnya. Selanjutnya mempengaruhi *aspek pawongan* yaitu anggota (*krama*) *subak* sebagai pendukung kelangsungan hidup petani, mulai mengancam ikatan kepentingan bersama dan terancam eksistensinya sebagai suatu organisasi tradisional. Kondisi seperti ini akhirnya akan merembet ke aspek *parhyangan*, di mana Pura Bedugul atau Pura Ulun Suwi (Pura *krama subak*) mulai kehilangan pendukungnya. *Tri Hita Karana* dalam lingkungan *subak* di

Kecamatan Denpasar Selatan secara perlahan namun pasti akan mengalami kehilangan unsur pengikatnya. Ketidakseimbangan struktur ini tidak saja secara horizontal mempengaruhi kehidupan masyarakat pendukung sistem *subak*, akan tetapi secara vertikal terjadi pengeseran dalam kehidupan religius sebagai masyarakat agraris.

Implikasi Alih Fungsi Lahan pada Infrastruktur *Subak* di Kecamatan Denpasar Selatan

Dari dimensi sosial budaya keberadaan *subak* memiliki peran untuk menjaga keseimbangan dengan Tuhan, manusia dan alamnya konsep ini dikenal dengan *Tri Hita Karana*. Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* menurut Wiana (2007: 141) merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Sebuah falsafah kultur Bali *Tri Hita Karana* yang menekankan pada teori keseimbangan menyatakan bahwa masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan dan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Konsep ini terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*) dan hubungan manusia dengan alam (*palemahan*).

Secara spesifik keberadaan *subak* penting dalam aspek *palemahan*, yaitu dimensi ruang yang mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Perwujudannya bisa dilihat dari adanya pelestarian lingkungan, selain itu melalui hubungan yang seimbang dan harmonis, yaitu keseimbangan antara *subak* ke hadapan Sang Maha Pencipta, dengan *saling asah*, *saling asih* dan *saling asuh* terhadap sesama umat manusia atau sesama petani *subak*, dan *rungu* (peduli) terhadap alam lingkungan sekitarnya, serta upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, menyebabkan jagad ini *rahayu* (lestari).

Menurut Sumarta (2008: 41), melalui *subak*, di bawah kendali *awig-awig*nya segala aktivitas yang menyangkut tentang pertanian, khususnya pertanian lahan sawah diatur dan dikendalikan. Aktivitas pertanian seperti pengaturan pola tanam, pengolahan lahan, pembagian air, penggunaan bibit, pemberantasan hama ataupun pemupukannya selalu berdasarkan sistem *subak*, yang diputuskan dalam suatu *perareman* (hasil keputusan bersama dalam suatu rapat *subak*).

Subak sebagai pranata sosial merupakan salah satu wujud budaya baik ditinjau dari ide ataupun gagasannya yang dituangkan dalam *awig-awig subak*, baik dilihat dari aktivitas ataupun kegiatannya mulai dari mengolah tanah pertanian, sampai padi di panen serta

serentetan upacara dalam konteks kegiatan ritual, maupun dilihat dari wujud fisiknya yang berupa petak-petak sawah, bendungan, terasering, saluran irigasi ataupun tempat-tempat suci, menyebabkan peran *subak* mampu menjaga keseimbangannya (Pitana, 2003: 61).

Fungsi penting seperti diuraikan di atas mulai tergerus oleh arus alih fungsi lahan. Hal ini bisa dilihat dari derasnya laju pembangunan di daerah Denpasar Selatan telah mengubah tofografi wilayah ini, awalnya merupakan hamparan sawah yang menghijau saat ini dipenuhi dengan gedung pusat bisnis, pasar, minimarket dan sebagainya. Saat ini Kecamatan Denpasar Selatan ada dan mengada dalam pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan kekinian di atas *space and place* atau ruang dan tempat komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat. Ruang hidup yang dibutuhkan saat ini telah berubah lebih banyak untuk kepentingan industri pariwisata dan banyak mengabaikan lahan pertanian.

Menurut Sanderson (2003:10-11) menjelaskan setidaknya ada empat aspek yang mengalami perubahan dalam aspek infrastruktur ketika ada sebuah fenomena sosial di suatu wilayah yakni teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi. Secara ekologi ada perubahan yang sangat signifikan dalam tata ruang wilayah di Denpasar Selatan saat ini. Pada masa awalnya, jalan-jalan *penepi siring* atau perkampungan di Kecamatan Denpasar Selatan, merupakan jalan yang dipergunakan untuk mengakses tempat-tempat suci dan fasilitas kegiatan adat, namun saat ini memiliki fungsi baru sebagai akses atau infrastruktur pendukung kehidupan kekinian. Perubahan fisik yang demikian pesatnya juga berimplikasi pada perbaikan wajah dan fisik Pura Ulundanu yang dulunya berada di tengah persawahan sekarang telah berada di tengah perumahan dengan suasana yang kontras dengan keberadaan awalnya.

Selain perubahan tata wajah Pura Ulundanu sebagai simbol fungsi religius *subak* yang mengalami modernisasi secara fisik. Implikasi infrastruktur yang paling nyata terlihat adalah mulai berkurangnya lahan pertanian karena sebagian besar tanah yang ada sudah dijual dengan berbagai alasan. Ini bisa dilihat dari data tentang jumlah lahan pertanian di daerah Kecamatan Denpasar Selatan berikut ini.

Tabel 1: Perkembangan Infrastruktur terhadap Jumlah Penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	% Pertumbuhan	Rumah	% Pertumbuhan	Toko/Perdagangan	% Pertumbuhan	Industri	% Pertumbuhan	Sarana Pariwisata	% Pertumbuhan
2010	185.985	-	27.366	-	2.246	-	198	-	31	-
2011	244.591	31,51	35.828	30,92	2.350	4,63	204	3,03	31	0
2012	249.660	2,07	52.440	46,37	2.491	6,00	216	5,88	35	12,90
2013	260.754	4,44	81.308	55,05	2.755	10,60	235	8,80	46	31,43
2014	266.175	2,07	84.760		2.755	0	235	0	46	0
% Pertumbuhan dalam 5 Tahun (2010-2014)	43,11		309,80		22,66		18,69		48,39	

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2014 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 43,11%, sedangkan pertumbuhan jumlah rumah 309,80%, jumlah toko/perdagangan 22,66%, jumlah industri 18,69% dan jumlah sarana pariwisata mengalami pertumbuhan 48,39%. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memang membutuhkan tempat tinggal/rumah. Hal inilah yang memicu terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman/perumahan. Sehingga berimplikasi lahan pertanian berupa sawah semakin sempit, secara tidak langsung menyebabkan *subak* yang ada karena pertanian pun semakin terancam keberadaannya. Selain itu alih fungsi yang terjadi secara keruangan mengakibatkan berubahnya tata guna lahan. Utomo (2014: 86) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Fenomena itu jika dikaitkan dengan Teori Praktik dari Bourdieu (Harker, dkk, 2005: 9-22) yang menawarkan formulasi-generatif dengan rumus (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik*), memudarnya sistem *subak* dapat diterangkan *habitus* yang diartikan sebagai sistem

subak akan menghasilkan hasil yang berlipat ganda bila disertai dengan *modal*. Tapi sistem *subak* atau *habitus* dan *modal* ini tidak akan berfungsi bila sawah yang dapat dipandang sebagai ranah tidak ada. Artinya infrastruktur berupa tanah sebagai ranah *subak* telah tiada maka pendukung *subak* itu tidak akan bisa melakukan praktik sosial seperti bertani, mengolah sawah dan sekaligus melakukan aktivitas ritual yang terkait dengan fungsi *subak* disamping fungsi utamanya sebagai pengelolaan air sawah.

Perubahan infrastruktur lainnya adalah perubahan dalam bidang teknologi, berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja dalam bidang pertanian juga berimplikasi pada pemanfaatan teknologi pertanian seperti alat membajak saat ini sudah memakai bajak dari mesin traktor. Teknologi pertanian Bali seperti *tenggala* sudah semakin sedikit dan bahkan tidak ada lagi. Perubahan pemanfaatan teknologi yang semakin modern berdampak juga pada demografi. Secara demografi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga mengakibatkan tergesurnya petani dari ranah ekosistem pertanian adalah memindahkan petani dari sistem kehidupan komunitasnya, baik dengan cara-cara yang “legal,” maupun cara-cara “ilegal”, dengan tujuan tertentu. Tujuan menggusur petani, baik secara legal maupun ilegal adalah demi alasan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesungguhnya di dalam tujuannya bermain kaum kapital yang sengaja mengkonstruksi keadaan lewat modernisasi zaman.

Implikasi Alih Fungsi Lahan terhadap Struktur Sosial *Subak*

Cepatnya alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan tidak bisa dilepaskan dari kuatnya hegemoni globalisme dengan ideologi kapitalisme dan gaya hidup yang hedonis. Fenomena ini menyebabkan para petani tergoda dengan harga tanah yang mahal dan berharap dengan menjual lahan sawahnya mereka akan bisa hidup berkecukupan. Namun, petani kurang menyadari bahwa dirinya telah terhegemoni oleh pengusaha. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Gramsci bahwa hegemoni adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu (Tilaar, 2003:77).

Hegemoni yang begitu kuat akhirnya berimplikasi luas pada *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan. Adanya alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan tidak saja mengubah infrastruktur material teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi tetapi berdampak pula pada perubahan struktur sosial masyarakatnya. Struktur sosial yang mengalami perubahan antara lain perubahan stratifikasi sosial, munculnya etnis-etnis lain selain Bali, perubahan kebijakan (*policy*) berkaitan dengan pemanfaatan tanah, pembagian

kerja secara seksual, sistem kekeluargaan dan kekerabatan,serta pendidikan (Sanderson, 2003:60).

Subak sebagai sistem memiliki nilai sosial dengan adanya *krama* (anggota) *subak*. Hilangnya lahan menyebabkan perubahan struktur *subak* di daerah ini. Istilah struktur sosial sebagaimana diungkapkan Redcliffe Brown adalah sebagai pengaturan kontinyu atas orang-orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau dikendalikan oleh institusi, yakni norma atau pola perilaku yang dimapankan secara sosial (Kaplan dan Manner, 2000 : 139). Dalam memberikan pengertiannya Redcliffe Brown mengemukakan bahwa struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat (Garna, 1996: 150). Berdasarkan hal tersebut *subak* sebagai lembaga atau institusi yang mengendalikan anggotanya sudah kehilangan powernya karena tanah yang ada sebagai simbol pengikatnya sudah semakin sedikit. Intinya, konsep jejaring dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005: 21). Selanjutnya, jejaring itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jejaring sosial (*networks*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerja sama atau jejaring sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya dalam kasus *subak* kepemilikan tanah atau lahan adalah pengikatnya.

Menurut Sutawan (2008: 19) sistem pertanian di Bali, selalu akan diidentikkan dengan sistem *subaknya* yang merupakan ciri khas sistem pertanian di Bali. Menurutnya, *subak* di Bali mempunyai lima ciri yaitu:

1. *Subak* merupakan organisasi petani pengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya. Sebagai suatu organisasi, *subak* memiliki pengurus dan peraturan organisasi (*awig-awig*) baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Subak* mempunyai suatu sumber air bersama, berupa bendung (empelan) di sungai, mata air, air tanah ataupun saluran utama suatu sistem irigasi.
3. *Subak* mempunyai suatu areal persawahan.
4. *Subak* mempunyai otonomi, baik internal maupun eksternal dan
5. *Subak* mempunyai satu atau lebih Pura Bedugul atau Pura yang berhubungan dengan persubakan.

Hal inilah yang membedakan sistem pertanian di Bali diaplikasikan melalui kegiatan *gotong royong* yang merupakan ciri yang kuat dari masyarakat petani Bali. Berpijak dari gotong royong inilah kepentingan bersama yang dilandasi rasa *paras paros selunglung sebayantaka* (tenggang rasa, susah dan senang sama dirasakan/ ditanggung bersama), semua yang terkait dengan masalah pertanian disatukan, sehingga muncullah suatu organisasi sosial

yang disebut *subak* (Sumarta, 2008). Jika *subak* sudah tidak ada maka sistem gotong royong yang ada dalam *subak* juga akhirnya terkikis, sehingga masyarakat Bali saat ini mulai berpikir individual.

Situasi yang terjadi itu tentunya agar berlawanan dengan konsep *pawongan*. Karena pada hakikatnya melalui konsep *pawongan*, selanjutnya, manusia dan masyarakat Bali meyakini bahwa pada hakikatnya manusia itu sama sebagai makhluk dan hamba Tuhan yang berbudaya, dan, karena itu, perlu dikembangkan sikap saling *asah, asih, dan asuh* serta bekerja sama demi tujuan hidup manusia bersama sebagai makhluk sosial (Abdulsyani, 1987). Prinsip ini relevan dengan ajaran Hindu dalam Weda yang menjadi dasar keyakinan masyarakat Hindu Bali, yaitu ajaran tentang *Tat Twam Asi* yang secara harfiah berarti "ia adalah kamu juga". Dengan ajaran *Tat Twam Asi* ini dimaksudkan bahwa sesungguhnya semua manusia itu adalah *satu* dan sama sebagai makhluk Tuhan. Ini diyakini bahwa menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri pula (Mantra, 1993).

Dampak selanjutnya dalam bidang struktur sosial berkaitan dengan alih fungsi lahan adalah adanya perubahan struktur masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang awalnya adalah monoetnis sebagai pendukung *subak*, namun saat ini telah terdiri dari berbagai etnis (multietnik) seperti yang ada dalam tabel berikut.

Tabel 2: Jumlah Etnis di Desa Pedungan tahun 2012-2013

No	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Etnis	Lak-laki	Perempuan	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	Bali	8.443	7.893	Bali	8.018	7.841
2	Jawa	2.614	2.613	Jawa	2.445	2.534
3	Betawi	6	6	Melayu	1.321	98
4	Madura	16	16	Batak	7	7
5	Batak	28	28	Sunda	44	40
6	Bugis	12	14	Banjar	11	11
7	Makasar	7	8	Bugis	150	125
8	Ambon	18	16	Makasar	3	4
9	Minahasa	6	7	Sasak	11	6
10	Aceh	6	6	Ambom	1	
11				Flores	3	2
12				Sabu	1	1
13				Sumba	4	8
14				Ternate	25	26

Sumber: Data Monografi Desa Pedungan, 2014

Data di atas menunjukkan alih fungsi lahan telah menyebabkan adanya perubahan komposisi penduduk di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Dampak riilnya saat ini Kecamatan Denpasar Selatan menjadi wilayah yang multi-etnik dan multikultural. Pesatnya perkembangan jumlah etnik bisa dilihat secara jelas dari tahun 2012 awalnya hanya 10 etnis tahun 2013 sudah terdiri dari 14 etnis. Dalam masyarakat multi-etnik dan multikultural di Kecamatan Denpasar Selatan yang terbentuk sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan, berdampak pula pada pendukung *subak* di daerah ini. Sistem *subak* tentunya tidak bisa diterapkan pada etnis tersebut, bukan karena mereka tidak orang Bali, melainkan lahan yang dimiliki atau yang ditinggali tersebut tidak lagi sawah yang merupakan dampak pembangunan infrastruktur yang merajalela. *Subak* sebagai sistem sosial telah terpinggirkan menjadi budaya subaltern yang tidak lagi menarik bagi masyarakat dimana *subak* diciptakan. Namun demikian ada hal yang menarik dari hasil temuan di daerah Kecamatan Denpasar Selatan walaupun *krama subak* sudah tidak ada tetapi *krama desa pakraman* ini tetap memelihara dan menjadi *penyungsum* Pura *Subak* (Pura Ulundanu).

Adanya alih fungsi lahan juga berpengaruh pada perubahan struktur sosial masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Saat ini jumlah petani di kawasan ini sudah sangat jarang. Karena adanya pandangan bahwa wilayah itu merupakan wilayah industri sehingga tidak wajar menjadi seorang petani. Dalam hal demikian petani menjadi kaum yang termarginalkan atau kaum yang menjadikan kelompok lain berbeda, yang berada lebih di bawah (Ratna, 2013:463). Namun, ada juga petani pemilik lahan pertanian, yang memang tidak menjual tanahnya. Mereka umumnya dari kaum berada dan menjalin kerja sama dengan petani penggarap untuk mengerjakan lahannya. Fenomena itu memunculkan struktur sosial baru yaitu kelompok petani penggarap yang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu sebelum alih fungsi lahan terjadi. Petani sebelumnya adalah petani yang menggarap tanahnya sendiri, sedangkan saat ini petani yang ada hanya mengerjakan tanah milik orang lain.

Implikasi Suprastruktur Alih Fungsi Lahan Terhadap Keberadaan *Subak*

Lauer mengemukakan bahwa perubahan sosial pada struktur sosial dimaknai sebagai perubahan fenomena sosial diberbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu-individu sampai dengan tingkat dunia (Martono, 2011: 5). Hubungan-hubungan tersebut tentunya dilatarbelakangi ideologi. Ideologi adalah sebuah representasi relasi individu-individu imajiner pada kondisi nyata dari eksistensinya (Althusser, 2010: 39). Dalam konteks ini adanya alih fungsi lahan sangat berimplikasi pada kehidupan suprastruktur masyarakat pendukung *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan. Awalnya para pemilik tanah

sangat terikat dengan *subaknya* secara sosio-religius, namun ketika tanahnya telah habis terjual ikatan ideologi sebagai *krama subak* mulai memudar.

Namun situasi itu tidak bisa mengubah ideologi *hita karena* secara total. Ini bisa dilihat dari masih kuatnya praktik religius melalui konsep *parhyangan*, manusia dan masyarakat Bali meyakini bahwa segala yang ada di dunia ini termasuk manusia adalah bersumber dari dan, pasti akan kembali menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran ini mendorong manusia dan masyarakat Bali untuk meningkatkan *crada dan bhakti* (iman dan taqwa) terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Waca* sesuai dengan ajaran-ajaran agama, keyakinan, serta tradisi yang dianutnya. Tidak mengherankan jika setiap lingkungan pranata sosial di Bali selalu terdapat pada setiap bangunan tempat suci untuk memuliakan Tuhan sebagai wahana bagi manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Begitu pula diyakini bahwa segala produk budaya dan peradaban manusia dan masyarakat Bali diciptakan sebagai persembahan kepada Tuhan atau kepada para Dewa yang sering disebut dengan *yadnya*. Ini dapat dilihat, misalnya, dari makna-makna simbolik yang religius dominan bersembunyi dan terkandung pada pelaksanaan *yadnya*, aktivitas tradisi atau adat, serta hasil-hasil karya budaya dan kesenian Bali (Gorda, 1996).

Dampak suprastruktur akibat alih fungsi lahan yang terjadi di Denpasar Selatan pada bidang religius bisa dilihat dari pelaksanaan kegiatan upacara di Pura Ulundanu (*Betara Sri*) sebagai representasi ideologi Hindu telah diserahkan kepada *desapakraman*. Meskipun hubungan suprastruktur aktivitas religius itu masih ada tetapi sudah mengalami pergeseran yang seharusnya dilakukan oleh pemilik lahan sebagai *krama subak* namun diserahkan pada masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keberadaan *subak* tersebut.

Artinya di sini ada perubahan pengelola Pura *Subak* dimana awalnya Pura *Subak* adalah Pura *Swaginayang* di *sungsung* oleh *krama subak* namun saat ini *diempon* oleh *krama desa pakraman*. Temuan ini menarik karena masyarakat tetap memiliki *trust* kepada kekuatan *Betara Sridengan* masih dijaganya Pura Ulundanu. Artinya perubahan di tatanan infrastruktur dan struktur sosial tidak seluruhnya mampu mengubah suprastruktur petani yang awalnya memiliki Pura *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan. Walaupun keberadaan sawah sudah sangat sempit, sistem sosial *subak* sudah tidak ada, namun masyarakat masih mempercayai keberadaan *Betara Sri* sebagai dewi kesuburan dengan tetap mempertahankan Pura *subak* yaitu Pura Ulundanu tersebut. Keyakinan masyarakat terhadap konsep *Betara Sri* sebagai dewi kesuburan menguatkan istilah *doxa* yang dikembangkan oleh Bourdieu, pengetahuan yang ditanamkan sejak kecil membuat orang secara sukarela patuh terhadap

sesuatu yang telah dianutnya secara turun temurun di tengah mulai hilangnya lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan.

Jika dikaitkan dengan ideologi umum masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana* yang merupakan *core value* kehidupan keseharian orang Bali (Gorda, 1996). Maka usaha untuk tetap menjaga Pura *subak* sebagai representasi ideologi *Parhyangan*, walaupun secara *pawongan* jumlah *krama subak* sangat sedikit karena dampak dari berkurangnya lahan pertanian (*palemahan*) ini merupakan upaya untuk tetap menjaga harmoni dan keseimbangan agar nilai religius yang merupakan nilai tertinggi dari budaya manusia tetap menjadi pedoman dalam bertindak.

KESIMPULAN

Alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan tanpa disadari telah menggeser budaya dan kepercayaan masyarakatnya yang beragama Hindu, yang ditunjukkan dengan memudarnya organisasi *subak* yang terkenal dengan sistem irigasinya. *Subak* sebagai sebuah struktur sosial tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur sawah, alih fungsi lahan sawah yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan telah merubah tata kehidupan masyarakat dan sistem *subak* yang ada di daerah itu. Selain itu juga, Pura Ulundanu untuk memuja Betara Sri, Dewi Kesuburan sebagai representasi suprastruktur kepercayaan petani juga mengalami perubahan saat ini tidak lagi *diempon/disungung* oleh petani. Hal ini disebabkan sawah berikut petaninya semakin menghilang keberadaannya di Kecamatan Denpasar Selatan. Temuan ini menarik karena masyarakat tetap memiliki *trust* kepada kekuatan *Betara Sri* dengan masih dijaganya Pura Ulundanu. Artinya perubahan tatanan infrastruktur dan struktur sosial tidak seluruhnya mengubah suprastruktur petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Walaupun keberadaan sawah sudah sangat sempit, sistem sosial *subak* sudah tidak ada, tetapi masyarakat masih mempercayai keberadaan *Betara Sri* sebagai dewi kesuburan dengan tetap mempertahankan Pura *subak* yaitu Pura Ulundanu tersebut. Keyakinan masyarakat terhadap konsep *Betara Sri* sebagai dewi kesuburan menguatkan istilah *doxa* yang dikembangkan oleh Boourdieu, pengetahuan yang ditanamkan sejak kecil membuat orang secara sukarela patuh terhadap sesuatu yang telah dianutnya secara turun temurun di tengah mulai hilangnya lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Althusser, Louis. 2010. *Tentang Ideologi : Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta : Jalasutra.

- Barker, Chris. 2009. *Culture Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bourdieu, Pierre. 1983. *Language and Symbolic Power*. Cambridge : Polity.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Gorda, IGN. 1996. *Etika Hindu dan Perilaku Organisasi*. Denpasar: Widya Kriya Gematama.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from Prison Note Books*. New York: International Publisher.
- Harker. 2005. *(Habitus x modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kaplan dan Manner. 2000. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lawang, R.M.Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Cetakan Kedua. Depok: FISIP UI Press.
- Mantra, I.B. 1993. *Bali: Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Piliang, Yasraf Amir. 2009. *Hiper Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta : LKiS.
- Pitana, I Gede.1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Powell, Hickman, 1930. *Bali the Last Paradise*. New York: Dodd, Mead.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Yakarta: Kencana.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Terjemahan dari Farid Wajidi. Jakarta : Rajawali.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Subak: Konsep Pertanian Religius Perspektif Hukum, Budaya, dan Agama Hindu*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1996. "Bisakah Subaltern Speak?" *Marxisme dan Interpretasi Kebudayaan*. Ed. C. Nelson dan L. Grossberg. Basingstronke: MacMillan Education.
- Sumarta, Ketut. 2008. *Subak Inspirasi Manajemen Pembangunan Pertanian*. Denpasar: Citra Budaya
- Sumarwan, A. 2005. "Membongkar yang Lama, Menenun yang Baru", *Basis*, Nomor 11-12, November-Desember.
- Suputra, Dewa Putu Arwan,dkk, 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung", *E-Journal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol. 1, No. 1.
- Sutawan, N. 2008. *Keberadaan PurapadaSubak*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Wiana, Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.